

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi terdiri dari dua kata yaitu pembangunan dan ekonomi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembangunan adalah hasil pekerjaan membangun, sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengolahan barang industri, pertanian dan perdagangan (Badudu, 2001).

Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1996 dalam Saerofi, 2005). Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung untuk jangka panjang.

Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berlangsung pada setiap daerah di wilayah Indonesia harus disesuaikan dengan potensi dan prioritas yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga keseluruhan pembangunan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional (Choirullah, 2007).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan hakikat dari proses dan sifat pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.

Secara umum permasalahan pokok pembangunan di Indonesia dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 adalah (Yuliadi, 2009):

- a) Tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin.
- b) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
- c) Kesenjangan pembangunan antar kelompok, wilayah dan daerah di Indonesia.
- d) Menurunnya kualitas sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.
- e) Rendahnya penegakkan hukum dan keadilan.
- f) Tingginya angka kejahatan dan masih adanya potensi konflik horisontal.
- g) Ancaman separatisme dan rendahnya kemampuan Hankam.
- h) Kelembagaan demokrasi yang masih lemah.

Untuk mengamati dan menganalisis permasalahan pembangunan dan bagaimana kebijakan yang diambil, maka pembahasan dilakukan menurut kelompok dan bidang-bidang pembangunan.

Indonesia sebagai negara yang kaya dengan SDA namun memiliki keterbatasan dalam kualitas SDM perlu merumuskan strategi kebijakan untuk dapat mewujudkan tiga tujuan pembangunan nasional (*triple bottom line*) secara simultan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat secara adil, dan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan SDA. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mencakup (Yuliadi, 2009):

- a. Peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang kompetitif.
- b. Implementasi tata ruang wilayah secara konsisten untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- c. Program diversifikasi pangan nasional melalui pengembangan pangan non beras untuk meningkatkan alternatif pangan rakyat menuju swasembada pangan.
- d. Pengembangan industri manufaktur yang mengandung nilai tambah (*value added*) yang tinggi sekaligus dapat menyerap tenaga kerja serta mendorong kegiatan ekonomi terkait.

- e. Pengembangan industri pendukung untuk memperkuat struktur industri nasional yang kokoh dan stabil bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi terkait.
- f. Peningkatan kualitas SDM melalui penguasaan dan penerapan Iptek dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.
- g. Adanya dukungan politik (*political will*) dari semua unsur pemerintah yang terkait untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

Meningkatkan etos kerja baik pada pengusaha maupun pekerja untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif serta secara simultan mencegah dan memerangi setiap praktek yang dapat merusak sistem ekonomi seperti KKN, *illegal logging*, dan sebagainya

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non-ekonomi. Oleh sebab itu, sasaran pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut Todaro (1983) dalam Suryana (2000) adalah:

- a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
- b. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya

manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.

- c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Ada empat model pembangunan yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (Suryana, 2000). Berdasar atas model pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal.

2.2 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999 dalam Saerofi,

2005). Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2003), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.

Menurut Simon Kuznet dalam Jhingan (2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Kinerja perekonomian Indonesia dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang selama periode 1969-1981 mencapai tingkat rata-rata 7,7% setahun. Tetapi mulai tahun 1982 pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun menjadi rata-rata 4% per tahun (Yuliadi, 2009).

Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu ($PDRB_t$) dengan PDRB sebelumnya ($PDRB_{t-1}$) Laju

$$\text{pertumbuhan ekonomi } (\Delta Y) = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Ahli-ahli ekonomi telah lama memandang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (Sukirno, 1996 dalam Saerofi, 2005):

a. Tanah dan kekayaan alam lain

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara di mana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer yaitu sektor di mana kekayaan alam terdapat kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pihak, dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis barang kegiatan ekonomi di lain pihak, sehingga membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi.

Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat kemungkinannya untuk memperoleh keuntungan tersebut dan menarik pengusaha-pengusaha dari negara-negara atau daerah yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut. Modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha tersebut dari luar memungkinkan kekayaan alam tersebut diusahakan secara efisien dan menguntungkan.

b. Jumlah dan Mutu Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Selain itu pula perkembangan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar yang diakibatkannya. Besarnya luas pasar tergantung pada pendapatan dan jumlah penduduk.

Akibat buruk pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia. Ini berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam tingkat produksi ataupun kalau bertambah, pertambahan tersebut akan lambat sekali dan tidak mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

c. Barang-barang modal dan tingkat ekonomi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal yang telah bertambah jumlahnya dan teknologi yang bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi.

Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan maka kemajuan yang akan dicapai akan jauh lebih rendah.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sikap masyarakat dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonomi, di antaranya sikap hemat untuk mengumpulkan lebih besar uang untuk investasi, sikap kerja keras dan kegiatan-kegiatan mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu menambah pendapatan dan keuntungan. Di sisi lain sikap masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara-cara produksi yang modern dan produktivitasnya tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat.

e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

Apabila luas pasar terbatas, tidak ada dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya tinggi. Karena produktivitasnya rendah maka pendapatan para pekerja tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi pasar.

2.3 Model Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Beberapa model dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Sjafrizal, 2008):

a. Model Basis Ekspor (*Export-Base Mode*)

Model ini diperkenalkan oleh Douglas C. North pada tahun 1956. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bila daerah tersebut mampu

mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah yang bersangkutan akan dapat ditingkatkan.

b. Model *Interregional Income*

Perluasan dari Model Basis Ekspor dapat dilakukan dengan memasukkan unsur hubungan ekonomi antar wilayah yang dikenal sebagai *Interregional Income Model* yang dikembangkan oleh Harry W. Richardson (1978). Dalam model ini, ekspor diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam sistem yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah. Kegiatan perdagangan antar daerah tersebut dibagi atas barang konsumsi dan barang modal.

c. Model Neo-Klasik

Model ini dipelopori oleh George H. Bort (1960) dengan mendasarkan analisisnya pada teori Ekonomi Neo-Klasik. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah.

d. Model Penyebab Berkumulatif

Model penyebab berkumulatif dikemukakan oleh Nikolas Kaldor yang mengkritik model Neo-Klasik. Model penyebab berkumulatif tidak percaya pemerataan pembangunan antar daerah akan dapat dicapai dengan

sendirinya berdasarkan mekanisme pasar. Menurut model ini, ketimpangan pembangunan daerah hanya dapat dikurangi dengan program pemerintah. Apabila hanya diserahkan pada mekanisme pasar, maka ketimpangan daerah akan terus meningkat seiring meningkat proses pembangunan.

2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2002) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Untuk menghitung PDRB yang dihasilkan suatu wilayah ada empat pendekatan yang digunakan, yaitu (BPS, 2002):

- a. Pendekatan produksi, yaitu pendekatan untuk mendapatkan nilai tambah di suatu wilayah dengan melihat seluruh produksi *netto* barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian selama satu tahun.
- b. Pendekatan pendapatan, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, meliputi:
 1. Upah/gaji (balas jasa faktor produksi tenaga kerja).
 2. Sewa tanah (balas jasa faktor produksi tanah).
 3. Bunga modal (balas jasa faktor produksi modal).
 4. Keuntungan (balas jasa faktor produksi wiraswasta/skill).

c. Pendekatan pengeluaran, yaitu model pendekatan dengan cara menjumlahkan nilai permintaan akhir dari seluruh barang dan jasa, yaitu:

1. Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba) dan pemerintah.
2. Barang dan jasa yang digunakan untuk membentuk modal tetap bruto.
3. Barang dan jasa yang digunakan sebagai stok dan ekspor netto.

d. Metode alokasi, model pendekatan ini digunakan karena kadang-kadang dengan data yang tersedia tidak memungkinkan untuk mengadakan perhitungan Pendapatan Regional dengan menggunakan metode langsung dengan tiga cara di atas, sehingga dipakai metode alokasi atau metode tidak langsung. Sedangkan untuk cara penyajian PDRB dilakukan sebagai berikut:

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai PDRB.
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi.

Dalam penelitian ini PDRB yang digunakan untuk penelitian pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Barat adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

2.5 Kebijakan Optimal Prioritas Sektoral

Arsyad (2004), berpendapat bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber-sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah dengan mengembangkan basis ekonomi sektoral dan kesempatan kerja yang beragam. Untuk tujuan tersebut diperlukan adanya kebijakan prioritas sektoral dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan.

2.6 Pengembangan Sektor Potensial

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan dan potensi-potensi pembangunan. Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, sektor potensial disuatu daerah harus dikembangkan dengan seoptimal mungkin. Arsyad (2004) dalam Saerofi (2005) mengatakan bahwa sampai

dengan akhir dekade 1980-an di Indonesia terdapat tiga kelompok pemikiran dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memantapkan keberadaan sektor industri. Ketiga kelompok pemikiran tersebut adalah:

- a. Pengembangan sektor industri hendaknya diarahkan kepada sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Pemikiran seperti ini diwakili oleh kalangan ekonom-akademis.
- b. Konsep Delapan Wahana Transformasi Teknologi dan Industri yang pada dasarnya memprioritaskan pembangunan industri-industri hulu secara serentak.
- c. Konsep keterkaitan antar industri, khususnya keterkaitan hulu-hilir.

2.7 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah menandakan suatu fenomena yang umum dijumpai, khususnya di negara berkembang. Namun hal ini, tidak harus dibiarkan terus berlangsung. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan antara lain adalah sumber daya alam, tenaga kerja, luas daerah, pasar ekspor, kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lainnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dari laju pertumbuhan pendapatan daerah yang bersangkutan sehingga upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pertumbuhan pendapatan suatu daerah ditentukan dengan bagaimana daerah yang bersangkutan berperan sebagai eksportir bagi daerah lainnya. Menurut teori basis ekonomi kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi kegiatan basis dan non basis. Sektor basis merupakan sektor pasar dari dalam maupun dari luar, sedangkan sektor non basis adalah sektor yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri.

